

# Konvergensi Program Penurunan Stunting dalam Kerangka Kebijakan dan Kolaborasi Lintas Sektor di Kabupaten Grobogan

Arifa Kohinoor Jadida

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia

Korespondensi penulis : [arifak.fafa@gmail.com](mailto:arifak.fafa@gmail.com)\*

**Abstract.** *Stunting reduction remains a national development priority in Indonesia, requiring cross-sectoral and collaborative approaches. Grobogan Regency, as one of the priority regions, has demonstrated commitment through the establishment of Stunting Reduction Acceleration Teams (TPPS) and the implementation of eight convergence actions. However, the effectiveness of these policies remains limited due to weak inter-agency coordination, limited capacity at the village level, and suboptimal community and private sector involvement. This study employs a qualitative approach using frameworks of collaborative governance, implementation outcomes, and multi-level governance to analyze the implementation dynamics in Grobogan. Findings reveal that while program acceptability is relatively high at the administrative level, it lacks substantive understanding among local implementers. Appropriateness and feasibility are hindered by resource constraints and inadequate data integration across sectors. Community involvement, such as the Foster Parent for Stunting Children (BAAS) initiative, remains incidental and is not yet part of a structured collaborative system. Nonetheless, several villages like Harjowinangun and Ringinkidul have demonstrated good practices by integrating nutritional programs with local potentials. This study highlights the urgent need to strengthen institutional capacity, develop functional intersectoral communication forums, and enhance implementer competencies to ensure the achievement of the 14% stunting reduction target by 2024 in a sustainable and inclusive manner.*

**Keywords:** *stunting, cross-sector collaboration, TPPS, policy implementation, governance*

**Abstrak.** Penurunan stunting menjadi prioritas nasional yang membutuhkan pendekatan lintas sektor dan kolaboratif. Kabupaten Grobogan sebagai daerah prioritas menunjukkan komitmen melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan pelaksanaan delapan aksi konvergensi. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya koordinasi antar OPD, keterbatasan kapasitas sumber daya di tingkat desa, serta belum optimalnya pelibatan masyarakat dan dunia usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori collaborative governance, implementation outcomes, dan multi-level governance untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan di Grobogan. Temuan menunjukkan bahwa penerimaan terhadap program relatif tinggi secara administratif, namun belum sepenuhnya disertai dengan pemahaman substantif di tingkat pelaksana. Kesesuaian dan kelayakan program masih terhambat oleh kurangnya sumber daya dan belum optimalnya integrasi data dan perencanaan lintas sektor. Pelibatan masyarakat, seperti melalui program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), masih bersifat insidental dan belum menjadi bagian dari sistem kolaboratif yang terstruktur. Beberapa desa seperti Harjowinangun dan Ringinkidul menunjukkan praktik baik dalam integrasi program gizi dengan potensi lokal. Studi ini menekankan pentingnya penguatan kelembagaan TPPS, pengembangan forum komunikasi lintas sektor yang fungsional, serta peningkatan kapasitas pelaksana agar target penurunan stunting menjadi 14% pada 2024 dapat tercapai secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** stunting, kolaborasi lintas sektor, TPPS, implementasi kebijakan, governance

## 1. PENDAHULUAN

Stunting masih menjadi isu prioritas nasional di Indonesia. Didefinisikan oleh WHO sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, stunting berdampak luas terhadap kualitas hidup dan produktivitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan prevalensi stunting nasional hingga 14% pada 2024, namun berbagai tantangan struktural dan implementatif menghambat pencapaian tersebut. Pendekatan konvergensi lintas sektor menjadi sangat penting yakni

menyatukan intervensi spesifik dan sensitif melalui koordinasi antara berbagai lembaga, sektor, dan level pemerintahan.

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu daerah prioritas penanggulangan stunting di Jawa Tengah. Data Riskesdas menunjukkan angka stunting mencapai 54,9% pada 2013 dan menurun menjadi 32,9% pada 2018, namun masih berada pada kategori tinggi. Meskipun data e-PPGBM 2020 menunjukkan prevalensi yang rendah (4,59%), cakupan input data yang baru mencapai 60,8% membuat hasil tersebut belum representatif. Penimbangan serempak Februari 2020 menunjukkan prevalensi 3,5%, dengan Kecamatan Gabus sebagai wilayah dengan angka tertinggi (11,84%). Ketimpangan ini menggambarkan tantangan besar dalam validasi dan penggunaan data sebagai dasar intervensi kebijakan.

Stunting di Grobogan memiliki akar penyebab yang kompleks dan multidimensi. Studi situasi yang dilakukan Bappeda Grobogan pada 2024 menyoroti bahwa tingginya kasus stunting berkorelasi dengan angka kemiskinan yang masih berada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Pada 2019, tingkat kemiskinan Grobogan sebesar 11,77%, menempati urutan ke-24 di Jawa Tengah. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang hanya mencapai 69,86 (juga di bawah rata-rata provinsi dan nasional), memperkuat gambaran ketertinggalan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak.

Berbagai faktor penghambat program intervensi juga telah diidentifikasi, diantaranya adalah rendahnya cakupan imunisasi, minimnya kehadiran ibu dan balita di posyandu, keterbatasan edukasi gizi, dan tingginya angka perkawinan anak yang berdampak pada kehamilan risiko tinggi dan bayi berat lahir rendah (BBLR). Program pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) kepada remaja putri dan ibu hamil juga belum optimal karena rendahnya motivasi dan kesadaran. Intervensi sensitif seperti akses air bersih dan sanitasi juga masih menjadi tantangan di banyak desa, terutama yang berada di daerah perbukitan dan kapur.

Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menetapkan berbagai strategi konvergensi. Penetapan desa lokus stunting melalui SK Bupati pada 2020 menjadi tonggak penting dalam pemetaan wilayah prioritas. Intervensi dilakukan melalui pendekatan terintegrasi yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, serta pemberdayaan masyarakat. Realisasi di lapangan masih menghadapi kendala klasik seperti keterbatasan anggaran di tingkat desa, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan belum optimalnya monitoring serta evaluasi.

Pemerintah Kabupaten Grobogan mengalokasikan anggaran cukup besar yaitu Rp30,48 miliar untuk intervensi spesifik dan Rp37,95 miliar untuk intervensi sensitif pada tahun 2020. Besarnya anggaran belum tentu berdampak signifikan terhadap penurunan stunting. Dalam

konteks ini, pelaksanaan strategi konvergensi yang terukur, terarah, dan berbasis data menjadi keniscayaan. Kajian terhadap konvergensi program penurunan stunting di Kabupaten Grobogan menjadi penting, tidak hanya untuk melihat efektivitas kebijakan, tetapi juga untuk mengevaluasi keselarasan antar aktor, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan strategi lintas sektor. Pendekatan kolaboratif yang solid dan adaptif terhadap realitas lokal, target jangka panjang untuk mewujudkan generasi yang sehat dan produktif dapat dicapai.

Meskipun banyak kebijakan multisektor telah diterapkan untuk mempercepat penurunan stunting, masih terdapat kesenjangan antara perumusan kebijakan dan implementasi di tingkat komunitas. Studi Rahman et al. (2024) di Kalimantan Selatan menyoroti bahwa meskipun kolaborasi multisektor telah dijalankan, penurunan angka stunting hanya menurun 0,1% antara 2022–2023 jauh dari target nasional. Penelitian ini menegaskan pentingnya intervensi spesifik dan sensitif yang tidak hanya terstruktur secara vertikal, tetapi juga terintegrasi secara horizontal antar lembaga di daerah. Evaluasi efektivitas model kolaborasi semacam ini di tingkat kabupaten masih terbatas, termasuk di Kabupaten Grobogan.

Hasil penelitian di Kabupaten Sinjai (Askar et al., 2023) mengindikasikan bahwa pelaksanaan aksi konvergensi lintas sektor masih menghadapi tantangan seperti lemahnya kualitas data sasaran, belum optimalnya pemantauan, dan kurangnya pelibatan aktif pemangku kepentingan lokal. Studi ini juga menggunakan model Van Meter dan Van Horn untuk mengevaluasi dimensi komunikasi, karakteristik organisasi, sumber daya, dan sikap pelaksana dalam kebijakan stunting. Pendekatan teoritis semacam ini belum banyak diterapkan dalam konteks Grobogan yang memiliki karakteristik geografis dan sosial ekonomi berbeda.

Studi Utomo et al. (2023) di Kabupaten Penajam Paser Utara menemukan bahwa kolaborasi lintas sektor dalam penurunan stunting masih terhambat oleh ego sektoral, keterbatasan anggaran, dan pola pikir masyarakat yang belum berubah signifikan. Kajian ini menggarisbawahi perlunya forum kolaboratif berkelanjutan dan adanya *bridging institution* yang dapat menyatukan berbagai aktor dalam satu kerangka kebijakan yang sinergis. Hingga kini belum ada riset serupa yang mengkaji secara mendalam dinamika institusional tersebut di Grobogan. Penelitian ini menjadi relevan untuk mengisi kekosongan literatur terkait efektivitas kebijakan kolaboratif dalam penurunan stunting di tingkat kabupaten.

Penelitian mengenai program konvergensi di tingkat daerah juga masih terbatas dalam mengevaluasi sejauh mana kolaborasi lintas sektor benar-benar mendorong perubahan pada level komunitas. Sebagian besar evaluasi berhenti pada tingkat laporan kegiatan atau output, tanpa mengaitkannya dengan perubahan angka prevalensi stunting yang bermakna. Di Kabupaten Grobogan sendiri, meskipun telah ditetapkan berbagai kebijakan seperti Peraturan

Bupati Nomor 57 Tahun 2022 dan penetapan desa lokus stunting, belum ada kajian akademik yang mendalam tentang bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan dan sejauh mana aktor lintas sektor benar-benar berkolaborasi secara efektif. Ini menciptakan ruang riset penting untuk menguji bentuk koordinasi yang dilakukan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan.

Penelitian yang secara spesifik mengkaji model kolaborasi lintas sektor dalam konteks Kabupaten Grobogan dengan menggunakan pendekatan *collaborative governance* seperti yang ditawarkan oleh Emerson atau Ansell & Gash akan menjadi kajian yang menarik. Model-model ini menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dinamika hubungan antar pemangku kepentingan dalam menyelesaikan masalah publik yang kompleks seperti stunting. Kajian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui analisis konvergensi program stunting di Grobogan yang tidak hanya memotret kebijakan secara normatif, tetapi juga mengevaluasi implementasi dan hambatan kolaborasi lintas sektor dalam kerangka tata kelola kolaboratif.

Kabupaten Grobogan telah menunjukkan komitmen serius dalam upaya penurunan stunting melalui penerbitan kebijakan dan pelaksanaan delapan aksi konvergensi, prevalensi stunting di wilayah ini, namun masih fluktuatif dan belum sepenuhnya menunjukkan capaian yang sejalan dengan target nasional. Ketimpangan data antara SSGI dan e-PPGBM, keterbatasan input data dari posyandu, serta rendahnya efektivitas koordinasi lintas sektor menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana implementasi konvergensi program benar-benar efektif dan terintegrasi. Tantangan lain yang mencuat adalah belum optimalnya pelibatan desa dalam pengambilan keputusan dan alokasi anggaran, serta masih dominannya pendekatan administratif ketimbang berbasis kebutuhan lokal.

Kebijakan multisektor telah dicanangkan, namun evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaannya di tingkat lokal masih sangat terbatas. Belum banyak kajian akademik yang menelaah bagaimana dinamika kolaborasi lintas sektor berlangsung, bagaimana peran aktor-aktor kunci dijalankan, serta sejauh mana kebijakan konvergensi diterjemahkan dalam praktik di lapangan. Perlu dilakukan kajian mendalam yang tidak hanya mengkaji substansi kebijakan, tetapi juga proses pelaksanaannya, hambatan-hambatan struktural, dan potensi perbaikan tata kelola kolaboratif dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi program konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Grobogan dalam kerangka kebijakan dan kolaborasi lintas sector dan mengidentifikasi hambatan dan potensi perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan

konvergensi stunting, khususnya dalam koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat lokal.

Permasalahan stunting di Indonesia menuntut pendekatan yang melibatkan lebih dari sekadar sektor kesehatan. Strategi nasional percepatan penurunan stunting telah menetapkan delapan aksi konvergensi yang mensyaratkan keterlibatan multisektor. Namun, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan ini di tingkat lokal seringkali menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, untuk memahami dinamika implementasi program konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Grobogan, diperlukan pendekatan teoretis yang mampu memetakan interaksi antarsektor, pelibatan aktor, serta bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan.

Salah satu pendekatan yang relevan adalah model collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008), yang menggambarkan proses kolaboratif antara institusi pemerintah dan aktor non-negara dalam pengambilan keputusan publik. Model ini mencakup enam elemen penting: (1) kondisi awal (initial conditions), (2) institusi formal (institutional design), (3) kepemimpinan fasilitatif, (4) aktor-aktor yang terlibat, (5) proses kolaboratif (termasuk dialog dan kepercayaan), dan (6) hasil akhir. Dalam konteks Grobogan, forum rembuk stunting, tim koordinasi, serta forum desa dapat dianalisis menggunakan model ini untuk menilai apakah pelibatan lintas sektor berjalan setara dan berbasis konsensus (Ansell & Gash, 2008).

Model ini kemudian diperluas oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) dengan konsep integrative framework for collaborative governance, yang menekankan adanya sistem tata kelola yang kolaboratif ketika berbagai pemangku kepentingan, baik negara maupun non-negara, menyatukan sumber daya dan kapasitasnya untuk mencapai tujuan bersama. Pendekatan ini sangat relevan dalam menganalisis proses koordinasi antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah), lembaga desa, tokoh agama, dan sektor swasta seperti program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Teori ini memungkinkan identifikasi struktur koordinasi, pembagian peran, dan dinamika komunikasi antaraktor dalam implementasi Perbup No. 57 Tahun 2022.

Kerangka evaluatif juga dibutuhkan untuk menilai hasil dan efektivitas kebijakan. Teori implementation outcomes dari Proctor et al. (2011) menyediakan variabel penting seperti acceptability, adoption, appropriateness, feasibility, fidelity, implementation cost, dan sustainability. Dalam praktiknya, hal ini dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana intervensi spesifik seperti pemberian TTD, penimbangan balita, dan kunjungan posyandu diterima masyarakat, serta apakah program ini layak diteruskan dengan sumber daya yang tersedia. Di Grobogan, indikator ini dapat mengungkap apakah program yang telah diluncurkan

benar-benar menjangkau kelompok sasaran dan konsisten dalam pelaksanaannya (Pamenang et al., 2024).

Teori multi-level governance (MLG) juga penting dalam konteks desentralisasi Indonesia. Teori ini menekankan bahwa proses pengambilan kebijakan dan implementasi tidak hanya terjadi dalam hubungan hierarkis pusat-daerah, tetapi juga mencakup hubungan horizontal antara berbagai sektor di tingkat lokal (Hooghe & Marks, 2003). Dalam kasus stunting, keberhasilan tidak hanya bergantung pada kebijakan nasional, tetapi pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan infrastruktur ke dalam satu ekosistem kerja. Analisis MLG dapat menjelaskan hubungan antara Pemkab, dinas teknis, kepala desa, dan forum masyarakat dalam menjalankan aksi konvergensi.

Kombinasi dari teori collaborative governance, implementation outcomes, dan multi-level governance menyediakan landasan konseptual yang kuat untuk menjawab tujuan penelitian ini. Teori-teori ini memungkinkan peneliti untuk menelaah implementasi program konvergensi penurunan stunting di Grobogan secara komprehensif, mulai dari struktur kelembagaan, interaksi antaraktor, hingga output dan dampak kebijakan. Kajian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan literatur dalam konteks studi implementasi kebijakan daerah berbasis kolaborasi di bidang kesehatan masyarakat. Kerangka implementasi ini dapat disimat gambar berikut:



**Gambar 1.** Kerangka Implementasi Kebijakan Stunting

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kebijakan (*policy research*), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi program konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Grobogan dalam kerangka kolaborasi lintas sektor. Pendekatan ini dipilih karena sifat permasalahan yang kompleks, melibatkan banyak aktor dan kebijakan lintas sektoral, sehingga tidak cukup hanya dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian kebijakan memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika interaksi antaraktor, konteks kelembagaan, serta efektivitas implementasi dalam praktik (Dunn, 2018).

Pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk menangkap realitas sosial secara holistik, termasuk bagaimana para pemangku kepentingan memahami, merespons, dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini mampu menjelaskan relasi kekuasaan, proses negosiasi kebijakan, dan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas program (Creswell & Poth, 2018). Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena berdasarkan data lapangan, bukan untuk menguji hipotesis atau hubungan antar variabel secara statistik.

Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan posisi strategis dan pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan program konvergensi. Informan utama terdiri dari aktor-aktor kunci dalam struktur tata kelola program stunting di Kabupaten Grobogan, antara lain dari DP3AKB, Dinas Kesehatan, TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting), kepala desa dari wilayah lokus stunting, serta kader Posyandu atau petugas gizi dari Puskesmas. Tokoh masyarakat atau pelaksana program di untuk menggali peran komunitas dalilibatkan am mendukung konvergensi program (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap pelaksanaan program di desa lokus. Wawancara bertujuan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta tantangan yang dihadapi oleh aktor-aktor di lapangan dalam pelaksanaan aksi konvergensi. Observasi digunakan untuk menangkap realitas implementasi program dan interaksi antaraktor secara langsung di lingkungan kerja mereka. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan seperti Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2022, laporan capaian delapan aksi konvergensi, data prevalensi stunting dari SSGI dan e-PPGBM, serta laporan evaluasi Dinas Kesehatan Grobogan.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulatif untuk meningkatkan validitas hasil penelitian. Pertama, melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci, dengan

panduan semi-terstruktur agar tetap fleksibel menangkap informasi baru. Kedua, melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah peraturan, laporan resmi, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan program stunting. Ketiga, observasi lapangan dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen, serta untuk menangkap dimensi perilaku dan praktik kolaboratif yang tidak selalu terungkap melalui pernyataan verbal (Patton, 2002).

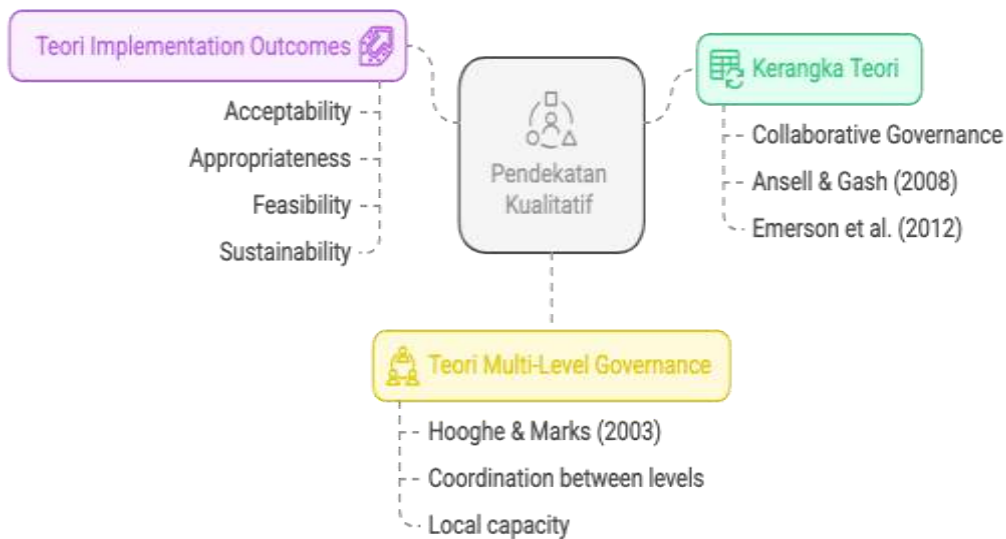
Pengolahan data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik analisis tematik. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah informasi penting dari hasil wawancara dan dokumen, mengelompokkan data berdasarkan kategori seperti aktor, tahapan pelaksanaan, tantangan, dan bentuk kolaborasi. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik agar mudah dipahami dan dianalisis. Kesimpulan kemudian ditarik berdasarkan pola-pola yang muncul, hubungan antar kategori, dan konsistensi dengan kerangka teori yang digunakan (Braun & Clarke, 2006).

Kerangka teori yang digunakan dalam analisis adalah *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008) serta Emerson et al. (2012), yang menawarkan struktur analisis terhadap proses kolaboratif antara aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Model ini memungkinkan peneliti menilai aspek-aspek seperti kondisi awal, desain kelembagaan, peran kepemimpinan, partisipasi aktor, dinamika proses kolaborasi, dan keluaran kebijakan. Setiap aspek tersebut akan dikaji berdasarkan temuan lapangan untuk menilai apakah pelaksanaan konvergensi di Grobogan benar-benar mencerminkan prinsip tata kelola kolaboratif.

Teori *Implementation Outcomes* dari Proctor et al. (2011) digunakan untuk mengevaluasi hasil jangka pendek dari implementasi kebijakan, termasuk tingkat keberterimaan program (*acceptability*), kecocokan program dengan konteks lokal (*appropriateness*), kemudahan pelaksanaan (*feasibility*), dan keberlanjutan (*sustainability*). Teori ini melengkapi analisis proses kolaborasi dengan pengukuran terhadap kualitas pelaksanaan program dan penerimaannya oleh masyarakat sasaran.

Teori *Multi-Level Governance* digunakan untuk melihat bagaimana interaksi antar pemerintah dari level kabupaten hingga desa, serta keterlibatan aktor non-pemerintah seperti lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan program. Ini penting dalam konteks desentralisasi Indonesia, di mana keberhasilan kebijakan nasional sangat bergantung pada koordinasi antarlevel pemerintahan dan kapasitas pelaksana di tingkat lokal (Hooghe & Marks, 2003).

### Pendekatan Kualitatif dalam Analisis Kebijakan



## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Tantangan Konvergensi Stunting di Kabupaten Grobogan

Pelaksanaan program konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Grobogan tidak terlepas dari konteks awal yang cukup kompleks. Sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2022, upaya penurunan stunting masih bersifat sektoral, dengan dominasi program oleh Dinas Kesehatan, sementara keterlibatan sektor lain belum optimal. Data yang ada juga memperlihatkan ketimpangan signifikan antara dua sistem pencatatan. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, angka prevalensi stunting di Grobogan mencapai 20,8%, naik dari 20,2% pada tahun 2023 dan 19,3% pada 2022. Sementara itu, data dari e-PPGBM tahun 2024 menunjukkan angka yang jauh lebih rendah, yakni hanya 7,5%. Perbedaan besar ini menjadi tantangan awal serius dalam penentuan kebijakan dan penganggaran program karena mengganggu akurasi perencanaan berbasis data.

Ketimpangan data ini juga berimplikasi pada tata kelola kebijakan konvergensi di lapangan. Pemerintah Kabupaten Grobogan menetapkan target ambisius untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD 2021–2026. Tren kenaikan angka stunting menurut SSGI dan perbedaan data yang signifikan, muncul pertanyaan tentang efektivitas sistem monitoring dan evaluasi yang digunakan. Banyak desa belum menjadikan stunting sebagai isu prioritas dalam Musrenbangdes, dan pemanfaatan dana desa untuk mendukung delapan aksi konvergensi masih terbatas. Input data e-PPGBM

sangat tergantung pada kader posyandu, yang seringkali menghadapi beban kerja berat tanpa insentif dan pelatihan berkelanjutan.

Dari sisi kelembagaan dan sumber daya manusia, tantangan awal muncul dalam bentuk rendahnya kapasitas teknis perangkat desa dan kelemahan koordinasi di tingkat kecamatan. Banyak kepala desa dan perangkat belum memahami secara komprehensif delapan aksi konvergensi yang menjadi komponen utama dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting. Fasilitator atau pendamping di beberapa kecamatan belum aktif dalam mendampingi proses pelaksanaan program, sehingga banyak desa mengisi pelaporan aksi konvergensi secara administratif tanpa pemahaman substantif. Hal ini berdampak pada tidak meratanya capaian konvergensi di Grobogan dan lemahnya sinergi antaraktor lokal dalam penanganan stunting secara berkelanjutan. Temuan penting tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 1.** Tantangan Awal Implementasi Konvergensi Stunting di Kabupaten Grobogan

| Aspek               | Tantangan Utama                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Data dan Informasi  | Ketimpangan data antara SSGI (20,8%) dan e-PPGBM (7,5%) tahun 2024               |
| Koordinasi          | Belum menguat forum kolaboratif yang aktif dan fungsional sebelum Perbup 57/2022 |
| Perencanaan Desa    | Isu stunting belum menjadi prioritas dalam Musrenbangdes                         |
| Sumber Daya Manusia | Rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap delapan aksi konvergensi             |
| Kelembagaan         | Peran TPPS kecamatan dan desa belum optimal; pendampingan belum merata           |

Sumber : Data Primer, 2024

### **Desain Kelembagaan Kelembagaan dan Forum Kolaboratif Stunting**

Desain kelembagaan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Grobogan secara formal telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2022. Peraturan ini memandatkan pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di semua tingkatan—kabupaten, kecamatan, hingga desa—sebagai forum kolaboratif lintas sektor. TPPS dirancang untuk menjadi penggerak utama pelaksanaan delapan aksi konvergensi, mulai dari analisis situasi hingga evaluasi program. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan forum ini belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip collaborative governance. TPPS di tingkat desa dan kecamatan masih cenderung bersifat administratif, dengan kegiatan seperti rembuk stunting hanya dilakukan secara simbolis setiap tahun dan minim tindak lanjut yang terukur. Perencanaan lintas sektor belum terintegrasi optimal, dan koordinasi antar OPD serta

pemerintah desa sering kali berlangsung satu arah, tergantung pada instruksi dari tingkat kabupaten.

Meskipun terdapat inisiatif seperti program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dan pelibatan dunia usaha, bentuk kolaborasi ini belum terlembaga secara sistemik ke dalam struktur TPPS. Peran sektor non-pemerintah masih terbatas pada kegiatan seremonial atau bantuan insidentil, bukan sebagai bagian dari perencanaan strategis. Ketimpangan kapasitas antar wilayah juga tampak mencolok, di mana beberapa kecamatan dengan kepemimpinan kuat menunjukkan kinerja yang lebih aktif, sementara wilayah lain pasif dan menunggu arahan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan forum kolaboratif dalam program stunting di Grobogan masih sangat bergantung pada kapasitas individu dan inisiatif lokal, bukan pada kekuatan kelembagaan secara menyeluruh. Dengan demikian, meskipun struktur kelembagaan sudah tersedia, substansi kolaborasi dan integrasi lintas sektor dalam pelaksanaannya masih perlu diperkuat secara signifikan.

**Tabel 2.** Evaluasi Kelembagaan dan Forum Kolaboratif Stunting di Grobogan

| Aspek                | Kondisi Nyata di Kabupaten Grobogan                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumen Regulasi     | Perbup No. 57/2022 telah menetapkan struktur TPPS hingga tingkat desa         |
| Fungsi TPPS          | Banyak TPPS desa/kecamatan bersifat administratif dan belum operasional aktif |
| Rembuk Stunting      | Dilaksanakan formal tahunan, namun minim partisipasi dan tindak lanjut        |
| Integrasi Lintas OPD | Rencana aksi masih sektoral, belum terintegrasi penuh antar dinas dan mitra   |
| Inovasi              | Bersifat ad-hoc, belum menjadi bagian dari sistem kelembagaan TPPS            |

Sumber : Data Primer, 2024

### **Kepemimpinan dan Peran Strategis Aktor Kunci**

Kepemimpinan merupakan salah satu elemen penting dalam pendekatan *collaborative governance*, karena menjadi penggerak utama bagi aktor-aktor yang memiliki kepentingan berbeda untuk duduk bersama dan bekerja secara sinergis. Bupati dan Wakil Bupati sebagai inisiator kebijakan penurunan stunting telah direalisasikan dalam bentuk regulasi dan penguatan kelembagaan, seperti Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2022. lapangan menunjukkan bahwa pada level kabupaten, koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Sosial sudah berjalan, namun pelaksanaan aksi konvergensi belum sepenuhnya terintegrasi.

Kecamatan dan desa, peran camat dan kepala desa sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program konvergensi. Beberapa kepala desa yang memiliki pemahaman baik dan kepemimpinan partisipatif terbukti mampu menggerakkan kader, merangkul masyarakat, dan mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan yang mendukung pencegahan stunting. Beberapa desa yang menganggap pelaksanaan aksi konvergensi sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai kebutuhan strategis pembangunan desa. Letak pentingnya pemimpin sebagai *fasilitator kolaborasi*, bukan sekadar pelaksana kebijakan. Forum-forum seperti TPPS dan rembuk stunting belum optimal dan berdampak nyata. Peran aktor kunci di semua level pemerintahan perlu diperkuat melalui pelatihan kepemimpinan kolaboratif, penguatan fungsi koordinasi, dan pemberian ruang inovasi berbasis lokal.

**Tabel 3.** Peran Strategis Aktor Kunci dalam Penurunan Stunting di Kabupaten Grobogan

| Aktor Kunci         | Peran Ideal                                                                    | Kondisi di Lapangan (Grobogan)                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bupati/Wakil Bupati | Menetapkan kebijakan, mengoordinasikan lintas sektor, memberi arahan strategis | Sudah menetapkan Perbup No. 57/2022 Koordinasi lintas sector telaksana                           |
| Bappeda             | Koordinasi perencanaan lintas OPD dan pengawasan pelaksanaan konvergensi       | Terlibat aktif dalam penyusunan dokumen, monitoring ke desa belum optimal                        |
| Dinas Kesehatan     | Pelaksana intervensi spesifik, pembina teknis kader dan Puskesmas              | Aktif di lapangan, masih dominan dalam forum, belum setara dengan OPD lain                       |
| Camat               | Koordinasi lintas desa, pengawasan dan fasilitasi TPPS kecamatan               | Variatif: ada camat proaktif, ada yang pasif dan hanya melaksanakan SOP                          |
| Kepala Desa         | Mengalokasikan anggaran, membentuk TPPS desa, mendorong partisipasi masyarakat | Beberapa desa aktif, namun sebagian belum menjadikan stunting sebagai prioritas                  |
| Kader Posyandu      | Pelaksana lapangan, pencatat e-PPGBM, penyuluh masyarakat                      | Beban kerja tinggi kurang optimal dalam pelatihan dan insentif; peran vital, kurang diberdayakan |

Sumber : Data Primer, 2024

### Dinamika Proses Kolaborasi dan Komunikasi Antar Aktor

Kabupaten Grobogan menunjukkan dinamika yang kompleks, dengan komunikasi yang masih didominasi oleh pola vertikal dan top-down. Pada tataran formal, kegiatan koordinasi seperti rembuk stunting, pertemuan TPPS, dan rapat koordinasi OPD memang rutin dilakukan, namun interaksi antar aktor cenderung bersifat administratif dan kurang dialogis. Informasi lebih banyak mengalir dari kabupaten ke desa, tanpa ruang refleksi atau umpan balik dari

pelaksana lapangan. Dalam banyak kasus, kepala desa dan kader posyandu hanya menerima arahan teknis tanpa dilibatkan dalam diskusi substantif atau evaluasi program. Hal ini menyebabkan lemahnya rasa kepemilikan (ownership) di tingkat desa terhadap program stunting, dan memperburuk kesenjangan persepsi antara perencana dan pelaksana kebijakan.

Terbatasnya integrasi sistem informasi lintas sektor memperlemah efektivitas kolaborasi. Meskipun e-PPGBM menjadi sumber data utama bagi Dinas Kesehatan, OPD lain seperti Dinas Sosial, Dispermades, dan Dinas Pendidikan belum secara aktif mengakses atau memanfaatkan data tersebut dalam penyusunan program. Platform terpadu untuk berbagi informasi dan melakukan pemantauan bersama menyebabkan tumpang tindih kegiatan serta rendahnya efektivitas intervensi sensitif. Beberapa inisiatif komunikasi antar aktor memang terjadi secara informal di lapangan, terutama di kecamatan dengan kepemimpinan aktif, namun belum terbangun menjadi sistem yang mapan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses kolaboratif di Grobogan masih perlu diperkuat dengan membangun mekanisme komunikasi yang inklusif, berbasis data, dan mendorong partisipasi lintas sektor secara setara.

**Tabel 4.** Tantangan Proses Kolaborasi dan Komunikasi Antaraktor dalam Penanganan Stunting di Grobogan

| Aspek Proses Kolaborasi     | Tantangan Utama                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arah Komunikasi             | Masih dirasakan top-down umpan balik dari desa dan pelaksana lapangan belum optimal                |
| Keterlibatan Desa dan Kader | Informasi teknis disampaikan; pelaksana lapangan belum merespon dengan optimal                     |
| Interaksi Antar-OPD         | Koordinasi berjalan baik telah ada forum integratif                                                |
| Penggunaan Data Bersama     | Data e-PPGBM yang diintegrasikan belum optimal diakses OPD non-kesehatan                           |
| Platform Informasi Bersama  | Tersedia sistem monitoring terpadu antar sektor dan level pemerintahan belum optimal di laksanakan |
| Forum Rembuk Stunting       | Partisipasi masyarakat dan swasta belum optimal                                                    |
| Koordinasi Informal         | Secara incidental dilaksanakan belum menjadi budaya kerja kolaboratif yang berkelanjutan           |

Sumber data primer 2024

### **Pelibatan Masyarakat dan Dunia Usaha**

Pelibatan masyarakat dan dunia usaha merupakan elemen penting dalam strategi konvergensi stunting yang menekankan pada sinergi multipihak. Di Kabupaten Grobogan, salah satu inisiatif yang menonjol adalah program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang

melibatkan pejabat, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha dalam memberikan dukungan langsung kepada anak-anak yang terindikasi stunting. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi sosial, sekaligus menutup kesenjangan pemenuhan gizi dan akses pelayanan dasar. Konsep BAAS menunjukkan potensi besar dalam membangun kolaborasi lintas sektor non-pemerintah, pelaksanaannya di lapangan walaupun cenderung bersifat insidental dan belum terintegrasi dalam perencanaan formal TPPS desa maupun kecamatan. Kegiatan bergantung pada momentum atau inisiatif individu tertentu, bukan pada sistem yang berkelanjutan dan terstruktur.

Partisipasi masyarakat dalam program stunting, khususnya melalui kader posyandu, PKK, dan tokoh lokal, menjadi ujung tombak pelaksanaan di tingkat desa. Keterlibatan ini seringkali dibatasi oleh lemahnya kapasitas teknis, minimnya pelatihan, serta kurangnya insentif dan dukungan logistik. Beberapa desa, masyarakat cenderung bersifat pasif karena kurangnya sosialisasi yang efektif dan tidak adanya ruang partisipatif dalam forum rembuk stunting. Keterlibatan lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan komunitas lokal juga belum terstruktur, mereka memiliki potensi strategis dalam menyampaikan pesan perubahan perilaku dan pengawasan sosial namun belum optimal dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan aktor non-pemerintah masih bersifat pelengkap, bukan bagian integral dari sistem kolaborasi.

Beberapa desa teridentifikasi sukses melaksanakan program stunting. Desa Harjowinangun dan Desa Ringinkidul telah aktif melaksanakan kampanye peningkatan konsumsi ikan sebagai sumber protein bagi balita dan ibu hamil, bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan. Program ini dinilai berdampak langsung pada pola konsumsi keluarga dan menjadi praktik baik dalam mengubah perilaku makan di masyarakat. Desa Godong, Bugel, Ketitang, dan Klampok mendapat penguatan dari organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah yang memberikan bantuan gizi serta pendampingan kepada ibu dan anak. Desa Krangganharjo menonjol sebagai lokasi kunjungan strategis pemerintah pusat (Menko PMK dan Kepala BKKBN) dalam intervensi terintegrasi stunting dan kemiskinan ekstrem, menandakan pentingnya dukungan lintas sektor. Desa Tegorejo dan Sumberahayu telah melaksanakan Rembuk Stunting secara aktif, mengintegrasikan isu stunting dalam musyawarah desa dan RKPDes 2024. Inisiatif-inisiatif ini mencerminkan bahwa ketika masyarakat dan organisasi lokal diberdayakan, program stunting tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi bagian dari agenda pembangunan desa yang nyata dan berdampak langsung.

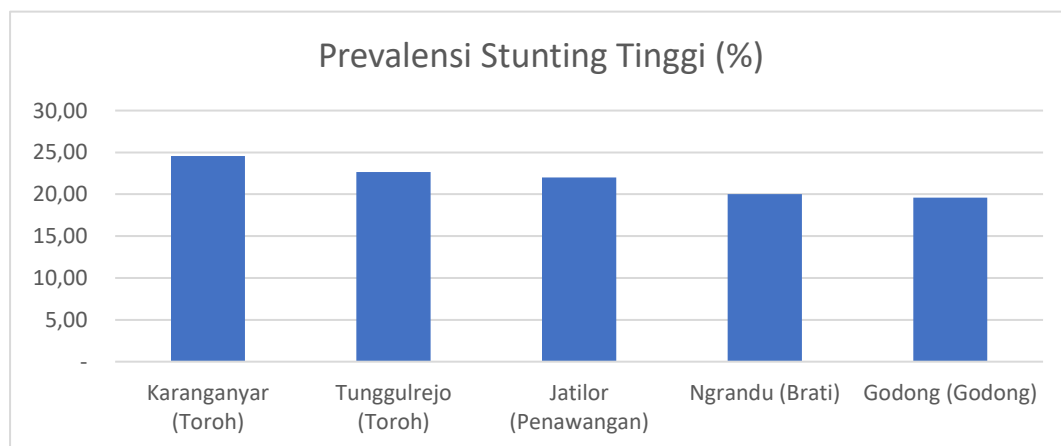
**Tabel 5.** Desa-Desa Inovatif dan Praktik Baik dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Grobogan

| Desa/Kecamatan                   | Inisiatif Unggulan                                                      | Mitra/Stakeholder                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Harjowinangun / Godong           | Kampanye GEMARIKAN (konsumsi ikan untuk pencegahan stunting)            | Dinas Peternakan dan Perikanan Grobogan |
| Ringinkidul / Gubug              | Sosialisasi GEMARIKAN, edukasi konsumsi protein hewani                  | Pemerintah kabupaten dan kader desa     |
| Godong, Bugel, Ketitang, Klampok | Pemberian bantuan gizi untuk ibu-anak dalam gerakan pencegahan stunting | Muhammadiyah Jawa Tengah                |
| Krangganharjo                    | Intervensi terintegrasi stunting dan kemiskinan ekstrem                 | Kemenko PMK, BKKBN, Bupati Grobogan     |
| Tegorejo                         | Rembuk Stunting aktif, integrasi isu dalam RKPDes                       | Pemerintah Desa dan Tim TPPS            |
| Sumberahayu                      | Rembuk Stunting, penentuan kegiatan prioritas stunting dalam APBDes     | TPPS dan perangkat desa                 |

Sumber data primer 2024

### Hambatan Implementasi Program Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Grobogan

Peraturan Bupati dan pembentukan TPPS di berbagai level telah terbentuk, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan signifikan. Salah satu kendala utama adalah lemahnya sistem pelaporan dan monitoring bersama antar OPD menyebabkan kegiatan berjalan sendiri-sendiri dan sulit dievaluasi secara komprehensif. Perencanaan desa pun belum sepenuhnya mengintegrasikan isu stunting sebagai prioritas, meskipun sudah tersedia data dari e-PPGBM dan arahan dari TPPS kabupaten.



**Gambar 2.** Prevalensi Stunting Tinggi

Beberapa desa mengisi pelaporan aksi konvergensi sebagai formalitas administratif, bukan sebagai alat perencanaan program yang strategis. Hambatan lain yang tak kalah penting adalah terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, baik di tingkat desa maupun kader lapangan. Kader posyandu sebagai ujung tombak pengumpulan data dan edukasi gizi sering menghadapi beban kerja yang tinggi, insentif yang minim, dan pelatihan teknis yang tidak berkelanjutan. Pemanfaatan dana desa untuk mendukung program stunting masih sangat rendah, karena ketidaktahuan perangkat desa dalam menyusun program berbasis delapan aksi konvergensi. Ketimpangan antar desa dan kecamatan dalam pelaksanaan program ini juga menjadi tantangan, di mana wilayah yang memiliki kepala desa atau camat aktif menunjukkan kinerja lebih baik dibanding yang pasif. Kurangnya forum komunikasi rutin antar pelaksana program, serta belum adanya platform data terpadu lintas sektor, Data tahun 2021 dari e-PPGBM menunjukkan beberapa Desa/Kecamatan dengan Angka Stunting Tertinggi sebagaimana tergambar di grafik diatas.

### **Evaluasi Implementasi Program Konvergensi melalui Implementation Outcomes**

Memahami sejauh mana program konvergensi penurunan stunting diimplementasikan secara efektif di Kabupaten Grobogan, pendekatan *Implementation Outcomes* menawarkan tiga indikator penting: *acceptability*, *appropriateness*, dan *feasibility*. Tingkat penerimaan (*acceptability*) terhadap program konvergensi di kalangan OPD dan kader lapangan tergolong tinggi, terutama karena adanya arahan langsung dari pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan kebijakan melalui Perbup No. 57 Tahun 2022. Penerimaan tersebut masih cenderung normatif dan belum diiringi dengan pemahaman mendalam terhadap esensi dan strategi delapan aksi konvergensi. Kader posyandu dan perangkat desa menjalankan tugas administratif tanpa keterlibatan dalam perumusan substansi program, sehingga partisipasi mereka lebih bersifat pelaksana, bukan pemilik kebijakan.

Aspek *appropriateness* dan *feasibility*, masih terdapat tantangan besar. Beberapa intervensi yang dirancang secara nasional seperti pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) dan edukasi gizi dirasa belum sepenuhnya sesuai dengan konteks lokal, baik dari segi pola konsumsi maupun kondisi sosial ekonomi keluarga. Ketersediaan sumber daya juga menjadi faktor penghambat utama dalam aspek *feasibility*, di mana keterbatasan dana desa, kurangnya pelatihan teknis, serta tidak meratanya distribusi kader dan tenaga pendamping memengaruhi kelayakan program untuk dijalankan secara berkelanjutan. Evaluasi ini mengindikasikan bahwa implementasi program konvergensi di Grobogan masih bersifat

formalis dan belum optimal dalam membangun keberterimaan, kesesuaian, dan keberdayagunaan program di tingkat tapak.

**Tabel 6.** Dimensi Evaluasi Indikator dan Temuan Lapangan

| Dimensi Evaluasi       | Indikator                                                              | Temuan di Kabupaten Grobogan                                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Acceptability</i>   | Tingkat penerimaan pelaksana dan masyarakat terhadap program           | Diterima baik secara normatif; banyak kader dan OPD menjalankan program karena kewajiban formal  |
|                        | Dukungan emosional terhadap intervensi                                 | Rendahnya rasa kepemilikan di tingkat desa; kader merasa hanya sebagai pelaksana administratif   |
| <i>Appropriateness</i> | Kesesuaian intervensi dengan konteks lokal dan kebutuhan spesifik desa | Intefyrvensi pusat belum sepenuhnya disesuaikan dengan kearifan lokal dan pola konsumsi setempat |
|                        | Relevansi program dengan kapasitas pelaksana                           | Pelaksanaan delapan aksi konvergensi masih formal; substansi dan strategi belum dipahami merata  |
| <i>Feasibility</i>     | Kemudahan pelaksanaan dengan sumber daya yang tersedia                 | Terbatasnya dana desa, kader minim pelatihan, kurangnya tenaga pendamping di kecamatan           |
|                        | Keberlanjutan pelaksanaan program                                      | Kegiatan berjalan jika ada instruksi; belum terbangun sistem penguatan lokal yang mandiri        |

Sumber : Data Primer diolah 2024

### **Koordinasi Multi-Level dan Integrasi Lintas Program dalam Penanganan Stunting**

Koordinasi multi-level merupakan aspek krusial dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan konvergensi penurunan stunting, terutama karena isu ini melibatkan kebijakan nasional, program daerah, dan pelaksanaan di tingkat desa. Di Kabupaten Grobogan, secara formal telah dibentuk struktur koordinasi melalui TPPS kabupaten, kecamatan, dan desa. Namun, hubungan vertikal antar level pemerintahan belum sepenuhnya berjalan fungsional. Masih terdapat kesenjangan komunikasi dan eksekusi antara kebijakan kabupaten dan pelaksanaan di lapangan. Instruksi seringkali bersifat satu arah tanpa mekanisme feedback dari desa, sehingga banyak kegiatan di tingkat desa dilaksanakan sebatas memenuhi target pelaporan, bukan karena pemahaman atau kebutuhan kontekstual.

Integrasi lintas program sektoral seperti sanitasi, pendidikan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masih belum optimal. Program seperti penyediaan jamban sehat,

PAUD gizi, dan bantuan sosial tidak selalu disinkronkan dengan lokasi desa prioritas stunting. Koordinasi horizontal antar OPD yang seharusnya menjadi kunci integrasi, sering berjalan secara parsial atau bahkan tumpang tindih. Misalnya, data sasaran balita yang digunakan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial tidak selalu sinkron, sehingga penyaluran bantuan atau edukasi gizi menjadi tidak tepat sasaran. Padahal, keberhasilan intervensi sensitif sangat bergantung pada efektivitas koordinasi lintas sektor. Maka, Grobogan perlu membangun sistem koordinasi multi-level berbasis data dan evaluasi terpadu untuk memastikan bahwa setiap program berjalan serempak, saling menguatkan, dan responsif terhadap kondisi nyata di desa.

**Tabel 8.** Evaluasi Koordinasi Multi-Level dan Integrasi Program Penurunan Stunting

| Tingkat Koordinasi / Program | Fungsi Ideal                                                                  | Kondisi Nyata di Grobogan                                                                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabupaten Kecamatan Desa     | Sinkronisasi arah kebijakan, pelaksanaan program dan monitoring bersama       | Instruksi bersifat top-down; belum ada mekanisme feedback reguler dari desa ke kabupaten       |
| TPPS Kecamatan TPPS Desa     | Penguatan teknis dan pendampingan dalam implementasi delapan aksi konvergensi | Pendampingan tidak merata; hanya beberapa kecamatan aktif memfasilitasi TPPS desa              |
| OPD Desa (lintas sektor)     | Integrasi program sanitasi, PAUD, perlindungan sosial, dan gizi               | Program masih jalan sendiri-sendiri; data dan sasaran tidak sinkron antar dinas                |
| Koordinasi OPD Horizontal    | Kolaborasi antar dinas dalam satu rencana aksi bersama                        | Masih sektoral; belum ada forum koordinasi teknis lintas OPD yang bersifat rutin dan strategis |
| Program Pusat Daerah         | Penyesuaian intervensi nasional dengan konteks dan prioritas lokal            | Implementasi program pusat (PMT, edukasi) belum disesuaikan dengan kebutuhan spesifik desa     |

Sumber : Data Primer diolah

Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menjadi tonggak penting dalam reformulasi kebijakan nasional terkait gizi anak dan pembangunan sumber daya manusia. Perpres ini tidak hanya menetapkan target ambisius menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024, tetapi juga mengintegrasikan berbagai sektor dalam satu kerangka konvergensi nasional. Melalui pendekatan intervensi spesifik (kesehatan langsung), intervensi sensitif (faktor penunjang seperti air bersih dan sanitasi), serta intervensi dukungan (kebijakan dan anggaran), Perpres ini menekankan pentingnya kerja lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Dampaknya anggaran terhadap stunting secara nasional makin menguat. Hal ini dapat disimak pada tabel berikut :

**Tabel 9.** Alokasi APBN untuk Penanganan Stunting Nasional (2020–2024)

| Tahun | Anggaran Stunting (Rp Triliun) | Persentase dari APBN | Peningkatan dari Tahun Sebelumnya | Fokus Intervensi                               | Keterangan Tambahan                                     |
|-------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2020  | 132,2                          | 5,2%                 | -                                 | Intervensi spesifik dan sensitif dasar         | Sumber: DJP; pandemi COVID-19 mempengaruhi alokasi umum |
| 2021  | 124,4                          | -                    | -5.9% (turun)                     | Reorientasi program & evaluasi kebijakan       | Sumber: Tim Percepatan Penurunan Stunting               |
| 2022  | 134,8                          | -                    | +8.4%                             | Intervensi terintegrasi mulai dikuatkan        | Perpres No. 72/2021 mulai diimplementasikan             |
| 2023  | 172,5                          | -                    | +27.9%                            | Integrasi OPD dan penguatan kelembagaan daerah | Fokus pada TPPS dan integrasi layanan dasar di desa     |
| 2024  | 186,4                          | 5,6%                 | +8.1%                             | Intervensi spesifik, sensitif, dan dukungan    | Target nasional: prevalensi stunting turun menjadi 14%  |

Sumber : Diolah dari data Sekunder berbagai sumber 2024

Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 merupakan kebijakan strategis nasional yang menjadi tonggak penguatan tata kelola percepatan penurunan stunting secara lintas sektor. Regulasi ini menekankan perlunya pendekatan intervensi spesifik, sensitif, dan dukungan, dengan target menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Implementasi kebijakan ini dijabarkan di tingkat daerah, termasuk Kabupaten Grobogan, melalui Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2022 tentang pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan pelaksanaan delapan aksi konvergensi. Dalam praktiknya, penguatan kebijakan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kelembagaan dan kolaborasi lintas aktor di tingkat pelaksana. Masih terjadi kesenjangan antara struktur formal yang terbentuk dan pemahaman substansial mengenai konvergensi di tingkat desa.

Analisis menggunakan kerangka *Implementation Outcomes* (Proctor et al., 2011) menunjukkan bahwa penerimaan (*acceptability*) terhadap program cukup tinggi secara normatif, terutama karena didorong oleh mandat pusat dan insentif kebijakan daerah. Penerimaan tersebut belum diiringi dengan pemahaman menyeluruh mengenai strategi delapan

aksi. Hal ini tercermin dari pelaksanaan kegiatan yang cenderung formalistik, seperti rembuk stunting dan pelaporan aksi, yang dilaksanakan tanpa tindak lanjut yang signifikan. Kesesuaian (*appropriateness*) program dengan kondisi lokal belum optimal. Intervensi PMT dan edukasi gizi belum mempertimbangkan secara utuh kearifan lokal dan pola konsumsi masyarakat. Kelayakan pelaksanaan (*feasibility*) menghadapi kendala sumber daya, baik dari sisi anggaran, kapasitas kader, maupun dukungan teknis yang tidak merata.

Kendala koordinasi antarlevel pemerintahan menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan konvergensi. TPPS memang telah dibentuk di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Komunikasi yang terjalin masih bersifat satu arah dari atas ke bawah, tanpa adanya ruang dialog yang mendorong refleksi dan perbaikan program berbasis kebutuhan desa. Koordinasi horizontal antar OPD pun belum optimal. Kegiatan masih berjalan secara sektoral, dan forum kolaborasi lintas dinas tidak berjalan rutin. Data gizi yang dikumpulkan melalui sistem e-PPGBM belum dimanfaatkan lintas sektor, sehingga intervensi program pendidikan, sanitasi, dan sosial belum disesuaikan dengan data gizi yang sebenarnya.

Dalam perspektif *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008), keberhasilan program lintas sektor sangat bergantung pada kepemimpinan fasilitatif dan adanya motivasi bersama di antara para pemangku kepentingan. Peran bupati, camat, kepala desa, dan kader posyandu menjadi kunci. Variasi kapasitas dan inisiatif antar wilayah menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan.

Beberapa desa menunjukkan praktik baik, seperti Desa Harjowinangun dan Ringinkidul yang aktif dalam kampanye GEMARIKAN, serta Desa Tegorejo dan Sumberahayu yang menyelenggarakan rembuk stunting secara partisipatif dan substantif. Sayangnya, banyak desa lain masih menjadikan program stunting sebagai beban administratif tahunan. Ketimpangan data antara e-PPGBM dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) juga menjadi isu serius dalam penanganan stunting di Grobogan. Pada tahun 2024, SSGI mencatat prevalensi sebesar 20,8%, sementara e-PPGBM hanya menunjukkan 7,5%. Perbedaan signifikan ini menimbulkan dilema dalam pengambilan keputusan dan evaluasi program, terutama karena banyak desa menggunakan e-PPGBM sebagai dasar perencanaan. Jika cakupan e-PPGBM belum optimal dan sistem pengolahan datanya belum terstandarisasi lintas OPD, maka perencanaan berbasis data menjadi rapuh. Hal ini menuntut perbaikan serius dalam tata kelola data serta penguatan kapasitas kader sebagai pengumpul data lapangan.

Dalam hal pelibatan masyarakat dan dunia usaha, Grobogan telah menunjukkan beberapa inisiatif positif. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), keterlibatan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, serta partisipasi UMKM lokal dalam penyediaan pangan

bernutrisi adalah contoh konkret sinergi multisektor. Keterlibatan ini masih bersifat insidental dan belum terlembaga dalam sistem kolaboratif yang berkelanjutan. Perlu dibangun kerangka regulatif dan kelembagaan yang dapat mengakomodasi partisipasi masyarakat secara sistemik, termasuk insentif, pelatihan, dan pengakuan peran. Pembangunan budaya kolaboratif yang berbasis komunitas lokal menjadi aspek kunci untuk menjadikan stunting sebagai isu bersama, bukan sekadar program pemerintah.

Kabupaten Grobogan memerlukan strategi penguatan tata kelola kolaboratif, mulai dari penguatan forum TPPS yang bersifat deliberatif, pelatihan lintas sektor yang tidak hanya teknis tetapi juga manajerial, pengembangan sistem monitoring terpadu berbasis data, serta peningkatan kapasitas kepemimpinan kolaboratif. Model inovasi lokal ke seluruh wilayah kabupaten perlu diperluas agar tidak hanya mengandalkan inisiatif individual. Jika strategi-strategi ini dilakukan secara konsisten dan berbasis evaluasi rutin, maka target penurunan stunting menjadi 14% tidak hanya menjadi angka dalam dokumen, tetapi bisa menjadi kenyataan yang berdampak nyata bagi kualitas hidup anak-anak Kabupaten Grobogan.

#### 4. KESIMPULAN

Penanganan stunting di Kabupaten Grobogan telah diarahkan melalui kebijakan nasional dan lokal yang sistematis, terutama melalui implementasi Perpres No. 72 Tahun 2021 dan Perbup No. 57 Tahun 2022. Upaya ini memperlihatkan struktur kelembagaan yang memadai dengan pembentukan TPPS di berbagai tingkatan dan pelaksanaan delapan aksi konvergensi. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mencapai efektivitas substantif, karena masih kuatnya pola kerja administratif, kurangnya integrasi program lintas sektor, dan belum optimalnya koordinasi antara kabupaten, kecamatan, dan desa.

Analisis melalui pendekatan *Implementation Outcomes* mengungkap bahwa tingkat penerimaan terhadap program cukup tinggi secara formal, tetapi belum diiringi pemahaman dan pelibatan mendalam dari aktor pelaksana di desa. Kesesuaian dan kelayakan pelaksanaan program juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas kader, dan infrastruktur kolaborasi yang belum merata. Koordinasi antar OPD dan integrasi data juga masih menjadi hambatan dalam menggerakkan program konvergensi yang berbasis pada kebutuhan dan konteks lokal.

Meski demikian, sejumlah praktik baik dari desa-desa inovatif di Grobogan menunjukkan potensi keberhasilan jika program dirancang dengan mempertimbangkan pendekatan partisipatif, berbasis komunitas, dan didukung oleh sistem koordinasi yang kuat. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, tata kelola kolaboratif, kapasitas pelaksana, dan

sistem data yang terintegrasi menjadi rekomendasi penting agar target penurunan stunting menjadi 14% di tahun 2024 dapat tercapai secara nyata dan berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui skema pendanaan dukungan kegiatan percepatan penurunan stunting tahun anggaran 2024. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, TPPS Kecamatan, para kader posyandu, serta perangkat desa yang telah memberikan akses data, wawancara, dan fasilitasi lapangan selama proses penelitian berlangsung.

## REFERENSI

- Afandi, M. N., Tri Anomsari, E., Novira, A., & Sudartini, S. (2023). *Collaborative governance in a mandated setting: Shifting collaboration in stunting interventions at local level. Development Studies Research*, 10(1), Article 2212868. <https://doi.org/10.1080/21665095.2023.2212868>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ardianti, I. S., & Afandi, M. N. (2023). *Collaborative Governance in Handling Stunting Problems at Bandung City*. Politeknik STIA LAN Bandung.
- Balogh, S., Emerson, K., & Nabatchi, T. (2012). *An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Dewi, M. D. H., & Sunjaya, D. K. (2022). *Implementation outcomes of national convergence action policy to accelerate stunting prevention and reduction at the local level in Indonesia: A qualitative study*.
- E-PPGBM Implementation Gaps Study – UN Global Pulse. (2023). *Assessing the Implementation of Indonesia's National Nutrition Information System*. <https://www.unglobalpulse.org>
- Faidati, N., & Sukanti. (2021). *Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Sleman. Jurnal Caraka Prabhu*, 5(1), 91–113. <https://doi.org/10.33753/jcp.v5i1.312>
- International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(9), 5478. <https://doi.org/10.3390/ijerph19095478>

- Khuzaimah, A., Kurniati, U., Haq, M. Z., & Yunita, Y. (2024). *Collaborative governance in stunting interventions at the local level: Enrekang Regency case study*. *Journal of Government and Development*, 1(3), 39–51. <https://doi.org/10.69816/jgd.v1i3.42560>
- Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Proctor, E. K., Silmere, H., Raghavan, R., Hovmand, P., Aarons, G., Bunger, A., ... & Hensley, M. (2011). *Outcomes for Implementation Research: Conceptual Distinctions, Measurement Challenges, and Research Agenda*. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 38(2), 65–76. <https://doi.org/10.1007/s10488-010-0319-7>
- Tinov, M. Y. T., & Isril, I. (2024). *Stunting Prevention in a Collaborative Governance Perspective*. In *Stunting Prevention in Collaborative Governance Perspective* (pp. 179–193). Atlantis Press. [https://doi.org/10.2991/978-2-494069-19-9\\_18](https://doi.org/10.2991/978-2-494069-19-9_18)
- UNICEF Indonesia. (2023). *Formative Evaluation of the National Strategy to Accelerate Stunting Prevention*. Jakarta: UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia>
- World Bank. (2023). *Strengthening Public Financial Management Systems for Better Nutrition Outcomes in Indonesia*. Washington, DC: World Bank.